



Midji Ancam Sita Ranmor Tunggak Pajak

■ Target 40 Persen Capaian PKB

■ DPRD Minta Pemkab Terlibat

PONTIANAK, TRIBUN - Gubernur Kalbar Sutarmidji mengakui tingginya angka tunggakan pajak di Pemprov Kalbar. Ia menyebut, tunggakan ini merupakan akumulasi dari beberapa tahun sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalbar, Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp 950 miliar lebih.

Sutarmidji mengancam akan melakukan upaya paksa jika wajib pajak tetap tak menunaikan kewajibannya. "Sanksinya kena den-

da pajak dan bisa sampai kena penyitaan, kalau tidak mau membayar. Pajak punya hak tagih istimewa sehingga wajib pajak harus membayar," ujar Sutarmidji kepada Tribun, Senin (24/2).

Ketegasan gubernur ini bukan tanpa sebab. Saat ini, terdapat 686.069 unit sepeda motor dan 53.674 unit kendaraan roda empat ke atas yang pemiliknya belum membayar PKB. Selain itu, penyumbang

■ Bersambung ke hal. 7



Sanksinya kena denda pajak dan bisa sampai kena penyitaan kalau tidak mau membayar.

Sutarmidji
Gubernur Kalbar



Midji Ancam Sita Ranmor Tunggak Pajak

Sambungan Hal.1

terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Kalbar datang dari PKB.

Potensi PKB di Kalbar tak tanggung-tanggung mencapai Rp 1.482.469.665.762 atau Rp 1,48 triliun lebih pada 2019 lalu. Bapenda Kalbar hanya mampu menarik PKB sebesar Rp 520.714.474.011 atau Rp 520 miliar. Jika dipersentase, realisasinya 37,90 persen dari jumlah potensi Rp 1,48 triliun. Jika ditotal, tunggakan PKB mencapai Rp 920.619.426.442 atau Rp 920 miliar lebih.

"Data yang disampaikan pada saya kemarin, tunggakan pajak dalam berbagai hal itu semuanya itu lebih dari Rp1 triliun. Ini akan kita maksimalkan," ucap Midji.

Ia menegaskan, nominal tunggakan itu merupakan akumulasi dari sekian lama. Pasalnya, sebelum kedaluwarsa akan tetap dihitung sebagai tunggakan.

Langkah pertama yang akan dilakukan, jelas Midji, adalah valuasi atau nilai ekonomis. Ia melihat, kendaraan bermotor sesuai dengan usia berapa tahun bisa dihapuskan. Namun melalui persetujuan DPRD. "Kemudian berapa tahun yang kita tagih, kemudian potensinya berapa. Potensi paling besar itu di kota sekitar lebih dari Rp 400 miliar tunggakan pajak seluruhnya," ucap Midji.

Melihat tingginya tunggakan pajak kendaraan, Midji meminta daerah tingkat dua ikut melakukan penagihan. Pasalnya, penerimaan pajak kendaraan bermotor menurutnya akan berperanguh pada bagi hasil dengan kabupaten kota.

Pajak kendaraan bermotor hingga saat ini menjadi prio-

ritas dan penyumbang PAD tertinggi. Bahkan menurut Midji, dengan keterlibatan kabupaten/kota maka tagihan tunggakan pajak dalam satu tahun bisa meningkat. Ia mencontohkan, jika tunggakan Rp 40 miliar, tapi karena keterlibatan pemerintah kabupaten kota maka pencapaian bisa Rp 80 miliar.

"Maka yang Rp 40 miliar itu saya akan serahkan ke kabupaten-kota sebagai bagian dari intensif pemerintah provinsi untuk pembangunan di daerah mereka. Sehingga tunggakan pajak bisa digunakan untuk pembangunan," ucap Midji mencontohkan.

Diakui Midji, upaya penagihan pajak kendaraan seperti yang dilakukan di DKI Jakarta sangat efektif. Pemerintah setempat menyasar hingga ke rumah masyarakat, menagih tunggakan pajaknya. Menurutnya, cara ini bisa saja bekerjasama dengan RT/RW setempat. Ia memastikan, ke depan Kalbar akan menerapkan pola seperti yang diterapkan DKI Jakarta.

Selain pajak kendaraan perseorangan, Midji juga menyinggung besarnya tunggakan pajak kendaraan yang ada di perkebunan. "Saya tidak tahu pasti berapa besarnya, tapi tunggakan pajak perkebunan itu cukup besar juga," tambah mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini.

Midji menginstruksikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus mengejar dan menagih tunggakan pajak kendaraan di perkebunan. Menurutnya, perkebunan mempunyai banyak kendaraan seperti truk dan beberapa waktu lalu Pem-

prov menggandeng Korsup-gah KPK untuk menangani tunggakan pajak kendaraan dari perkebunan.

Begitu juga dengan pajak alat berat, Midji meminta Bapenda mengoptimalkan penagihan tunggakan pajak sampai Oktober mendatang. "Kita akan tetap tagih kalau untuk alat berat itu sampai Oktober. Lewat dari itu tidak akan bisa tagih lagi karena itu dianggap sebagai bagian dari komponen produksi," ujarnya.

Midji menegaskan, dump truck perkebunan tetap ditagih pajaknya. Pihaknya telah mengidentifikasi satu perkebunan yang mempunyai 1.000 unit dump truck. Pajak 1.000 unit dump truck itu tetap harus dibayar walaupun kegiatannya di dalam areal perkebunan.

Midji menyebutkan setahun memimpin Kalbar, penerimaan pajak daerah terus mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya penerimaan pajak, maka pembangunan akan semakin baik. "Pajak itukan untuk percepatan pembangunan. Alhamdulillah satu tahun ini ada peningkatan yang sangat signifikan dari pajak," sebutnya.

Tak Sulit

Ia menyarankan, jika ada yang tidak mampu membayar pajak atau merasa keburatan, maka ajukan permohonan keringanan terhadap tunggakan pajak.

"Kita akan maksimalkan tagihan itu. Kalau kendaraan bermotor kita punya database-nya. Kita akan kerjasama dengan provider nanti mungkin akan mengingatkan wajib pajak yang sudah jatuh tempo atau yang belum membayar kita akan

ingatkan," sebutnya.

Midji yakin, apabila tunggakan pajak sekitar Rp 1 triliun itu dapat ditagih, maka peningkatan pembangunan sangat signifikan. "Saya yakin kalau tunggakan pajak bisa kita tagih 30- 40 persen sudah bagus dan mudah mudahan bisa," pungkasnya.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalbar H Irsan mengungkapkan, target pajak daerah 2020 mencapai Rp 2,092 triliun. Dengan jumlah tunggakan yang ada, mestinya target pajak akan dapat terpenuhi.

Dipaparkannya, target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp 572 miliar, target Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) mencapai Rp 591 miliar, target Pajak Air Permukaan (PAP) Rp 6 miliar, target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB) Rp 581 miliar dan Pajak Rokok mencapai Rp 345 miliar.

Ia mendorong pemerintah kabupaten/kota mendata jumlah kendaraan milik pribadi atau swasta dan pengusaha, termasuk kendaraan roda delapan dan alat berat yang menunggak pajak.

Politisi PKB ini menerangkan, berdasarkan data yang ada maka semua kabupaten kota rata-rata signifikan untuk penunggak pajak kendaraan bermotor termasuk untuk pelat merah.

"Kami melihat setelah dilakukan monitoring disejumlah daerah belum ditemukan data akurat berapa jumlah penunggak. Ini menunjukkan UPT PPD belum siap. Kami imbau untuk didata sehingga bisa diukur jumlah pajak kendaraan bermotor," pungkasnya. (oni/dho)